

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)  
DALAM PENDIDIKAN DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

JURNAL SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh  
Firdaus Malaya Dewi  
NIM 10110241017

**PROGRAM STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN  
JURUSAN FILSAFAT DAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
OKTOBER 2014**

## PERSETUJUAN

Artikel jurnal yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PENDIDIKAN DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH” yang disusun oleh Firdaus Malaya Dewi, NIM 10110241017 ini telah disetujui oleh pembimbing untuk di *up-load*.

Pembimbing I



Dr. Mami Hajaroh, M. Pd.  
NIP 19680308192032001

Yogyakarta, 8 Oktober 2014

Pembimbing II



Petrus Priyoyuwono, M. Pd.  
NIP 195606221987021001

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PENDIDIKAN DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH**

Firdaus Malaya Dewi  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Malaya.dewi@yahoo.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah yang meliputi implementasi PUG pada pendidikan formal dan non formal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian adalah staf bidang pendidikan non formal yang bertanggung jawab terkait gender, kepala sekolah dan koordinator PKBM pada pendidikan non formal, teknik penentuan subjek ditentukan dengan teknik snowball sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan pencermatan dokumen. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dilihat dari proses implementasi kebijakan bahwa dari aspek komunikasi sudah jelas, sumber daya staf yang masih kurang, anggaran dan fasilitas sudah terpenuhi, disposisi yang baik dari pelaksana, penyebaran tanggung jawab jelas serta kerjasama yang baik antar pelaksana kebijakan. (2) Pelaksanaan sosialisasi PUG dilaksanakan pada jenjang pendidikan formal dan non formal oleh Dinas pendidikan Kabupaten Klaten sebagai langkah awal implementasi PUG yakni pada 13 sekolah/lembaga di Kecamatan Prambanan. Sosialisasi diberikan kepada kepala sekolah tiap jenjang pendidikan formal dan ketua PKBM pada pendidikan non formal. Dari kegiatan sosialisasi PUG ada peningkatan wawasan gender dan pengarusutamaannya. (3) Hambatan yang terdapat dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan adalah dana yang hanya bersumber dari APBD serta sumber daya staf yang kurang memadai. Pada sekolah, hambatan dalam implementasi PUG adalah alokasi waktu khusus dalam pelaksanaan kegiatan responsif gender, sehingga PUG dilaksanakan dengan mengintegrasikan dalam pembelajaran.

Kata kunci: *gender, pengarusutamaan gender, pendidikan*

## ***IMPLEMENTATION OF GENDER MAINSTREAMING POLICY IN EDUCATION IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION KLATEN REGENCY CENTRAL JAVA PROVINCE***

*Firdaus Malaya Dewi  
Yogyakarta State University  
Malaya.dewi@yahoo.com*

### ***ABSTRACT***

*This study aims to describe the implementation of gender mainstreaming policies in Klaten District Education Office in Central Java province which includes the implementation of gender mainstreaming in the formal and non-formal education. This research is qualitative. Subjects were non-formal education sector staff in charge of gender related, principals and coordinators PKBM in non-formal education, technical determination of the subject is determined by the snowball sampling technique. Techniques of data collection using interviews and scrutiny of documents. Analysis of the data using an interactive model of Miles and Huberman which include data reduction, data presentation, and conclusion. Engineering Data validation was done by triangulation and triangulation techniques. The results showed that: (1) Implementation of gender mainstreaming policies in Klaten District Education Office seen from the implementation of aspects of the policy that is clear communication, staff resources are lacking, budget and facilities are met, the good disposition of the implementers, deployment responsibilities clear responsibility and good cooperation between policy implementers. (2) Dissemination PUG implemented in formal education and non-formal education by the Department of Klaten district as the first step in the implementation of Gender Mainstreaming 13 schools / institutions in the District of Prambanan. Socialization is given to the principal every level of formal education and chairman of the PKBM in non-formal education. Of socialization there is an increased insight into gender mainstreaming and mainstreaming. (3) Barriers contained in*

*the policy implementation of gender mainstreaming in education is the only source of funds from the budget and staff resources are inadequate. At school, obstacles in the implementation of gender mainstreaming is the allocation of a special time in the implementation of gender responsive, so PUG implemented by integrating learning.*

*Keywords: gender, gender mainstreaming, education*

## **PENDAHULUAN**

Sebagai strategi pengarusutamaan gender dalam pendidikan, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan. Di sektor pendidikan pelaksanaan pengarusutamaan gender telah diatur dalam Permendikans Nomor 84 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam pendidikan. Pelaksanaan PUG baru sebatas sosialisasi terhadap lembaga-lembaga sekolah di Kabupaten Klaten serta penyusunan kegiatan pengarusutamaan gender. POKJA PUG belum tersusun secara berjangka untuk kelangsungan rencana serta pelaksanaan pengimplementasian kebijakan PUG di sektor pendidikan. Mengingat bahwa *gender mainstreaming/pengarusutamaan gender* adalah mengorganisir dan melihat perkembangan proses kebijakan, serta implementasi dan evaluasinya, maka diperlukan tenaga-tenaga ahli gender yang tepat.

Pengelolaan gender dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten masih dibebankan pada Kepala Seksi Perpustakaan yang merupakan bagian dari Bidang Pendidikan Non Formal di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Pelaksanaan sosialisasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dilakukan pada 13 sekolah yang telah ditunjuk pada pendidikan formal yakni jenjang TK, SD, SMP, dan SMA, serta pada pendidikan non formal yakni pada PKBM atau Pusat kegiatan Belajar Masyarakat di wilayah Kecamatan Prambanan.

Penelitian ini penting untuk dikaji mengingat kebijakan pengarusutamaan gender merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan gender tanpa diskriminasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, kritik, dan rekomendasi kepada para pembuat dan pelaksana kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan untuk menjalankan kebijakan dengan tepat, sehingga tujuan utama perumusan kebijakan yakni untuk mengatasi permasalahan ketidakadilan gender dapat dilaksanakan dengan baik.

## **Implementasi Kebijakan**

Abidin (2006) menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat (Syafaruddin: 2008: 75). Menurut Van Meter dan Von Horn dalam Arif Rohman (2009: 134), implementasi kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan individu, pejabat atau kelompok pemerintahan atau swasta

yang diarahkan kepada ketercapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Implementasi kebijakan dapat disebut sebagai rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah sebuah kebijakan ditetapkan, baik yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategik, maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran dari kebijakan yang telah ditetapkan tersebut (Yoyon Bachtiar Irianto, 2012).

### **Pengarusutamaan Gender**

Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*) merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (marginalisasi, stereotipe, subordinasi, kekerasan dan beban ganda). Sesuai dengan Inpres No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional, pengertian Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

### **Hakikat Pendidikan**

Menurut Undang-undang Sisdiknas Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang dimaksud pendidikan adalah usaha sadar dan

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pada umumnya pendidikan menurut jenisnya dibedakan menjadi tiga macam. Ketiga macam tersebut adalah: a) pendidikan formal, b) pendidikan non formal, dan c) pendidikan informal.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Mei-Juli 2014 di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jl Pemuda Selatan No 151. Peneliti juga melakukan penelitian di beberapa sekolah dan lembaga, yaitu; TK Pertiwi Tlogo Klaten, SD N 1 Prambanan Klaten, SMP N 1 Prambanan Klaten, SMA N 1 Prambanan Klaten, dan PKBM Cipta Karya.

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Perpustakaan Bidang Pendidikan Non Formal di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Kepala sekolah jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Informan dipilih secara *snowball sampling*. Objek dalam

penelitian ini adalah implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian meliputi wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen pokok sehingga kedudukan peneliti tidak dapat diwakilkan ketika proses pengambilan data berlangsung. Pengumpulan data utama dalam penelitian ini menggunakan pedoman dokumentasi dan wawancara.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan model analisis interaktif Milless and Hubberman (1992:18 – 20) dalam Sugiyono (2009) yaitu interaktif model yang mengklasifikasikan analisis data dalam langkah-langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH**

Untuk melihat proses implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, peneliti menggunakan teori George Edward III. Dalam teori George Edward III disebutkan bahwa ada empat aspek yang

berpengaruh terhadap keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan. Aspek pertama yaitu komunikasi. Dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai gender dan pengarusutamaannya dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten melalui sosialisasi. Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pendidikan, Dinas Pendidikan melaksanakan kegiatan sosialisasi pengarusutamaan gender pada 13 sekolah/lembaga pada pendidikan formal maupun non formal. Tiga belas sekolah yang ditunjuk untuk diberikan sosialisasi pengarusutamaan gender tersebut yakni SDN 1 Prambanan, SDN 1 Brajan, SDN 1 Randusari, SDN 1 Joho, SDN 1 Cucukan, SDN 1 Kebondalem Lor, SDN 1 Sengon, PAUD Taji, TKP Tlogo, TKP 1 Brajan, SMPN 1 Prambanan, SMAN 1 Prambanan, dan PKBM Cipta Karya Prambanan.

Aspek kedua, yaitu sumber daya. Tanggung jawab gender dilimpahkan oleh Bidang Pendidikan Non Formal (PNF) yakni kepada kasi perpustakaan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Selain pelimpahan kewenangan, fasilitas juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan PUG dalam pendidikan. Selain sumber daya manusia dan fasilitas, anggaran menjadi hal yang penting dalam suatu implementasi

kebijakan. Anggaran yang tersedia dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan gender dan pengarusutamaannya yaitu dari APBD, anggaran tersebut dirasa kurang jika kebijakan tersebut diimplementasikan pada seluruh sekolah pada semua jenjang pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Klaten serta pada pendidikan non formal yang ranahnya lebih pada masyarakat.

Aspek yang ketiga adalah disposisi atau sikap pelaksana. Staf Dinas Pendidikan yakni Kasi Perpustakaan yang menangani kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan memiliki disposisi yang baik terhadap kebijakan tersebut meskipun selain tanggungjawabnya dalam perpustakaan juga memiliki tanggung jawab gender dalam pendidikan.

Aspek terakhir adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi harus terdapat dimensi SOP (*Standard Operating Procedure*) yang merupakan tata laksanaan dalam melakukan suatu hal yang berisi tentang petunjuk dan aturan-aturan yang ada dalam organisasi. Pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Kasi Perpustakaan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.1/5314/11 tentang penyelenggaraan program pendidikan non formal pada pengarusutamaan gender. penyebaran tugas antar pelaksana dalam melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sudah terbagi cukup baik yaitu Kepala

Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten mengeluarkan SK dan Kasi Perpustakaan Dinas Pendidikan yang melaksanakan serta melakukan pelaporan kegiatan sosialisasi PUG pada pendidikan formal dan non formal di 13 sekolah/lembaga.

### **Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan pada Pendidikan Formal**

Kebijakan pengarusutamaan gender pada pendidikan formal dilakukan pada jenjang pendidikan TK, SD, SMP dan SMA. Sosialisasi gender oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten diberikan kepada kepala sekolah yang telah ditunjuk untuk mendapatkan sosialisasi gender. Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Dinas Pendidikan yang baru sebatas sosialisasi dilaksanakan pada 13 lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Peneliti melakukan penelitian di TK Pertiwi Tlogo, SD N 1 Prambanan, SMP N 1 Prambanan dan SMA N 1 Prambanan. Tujuan dari diadakannya sosialisasi gender pada tiap-tiap sekolah adalah agar para guru dan karyawan dapat memahami gender dan pengarusutamaannya di sekolah.

Pelaksanaan pengarusutamaan gender di TK Pertiwi Tlogo para guru masih pada tahap pemahaman tentang gender, karena di TK Pertiwi Tlogo selama ini baru pertama kalinya mendapatkan pemahaman terkait gender. TK Pertiwi Tlogo faktor pendukung dalam

pelaksanaan PUG adalah pihak sekolah yang pasti menerima dan berusaha untuk melaksanakan kegiatan dari apa yang telah di sosialisasikan oleh Dinas Pendidikan. Di SD N 1 Prambanan implementasi PUG belum ada program khusus terkait gender. Pengarusutamaan gender secara implisit tersirat dalam pembelajaran yang responsif gender, selain itu di SD N 1 Prambanan dalam menunjang PUG di sekolah, aktivitas sekolah memberikan kebebasan pada siswanya baik perempuan maupun laki-laki. di SD N 1 Prambanan hal yang menjadi penghambat dalam tindak lanjut sosialisasi gender yang dilakukan untuk implementasi pengarusutamaan gender adalah tidak adanya waktu yang cukup untuk mengimplementasikan kegiatan secara khusus tentang pengarusutamaan gender. Pelaksanaan PUG di SMP N 1 Prambanan dari program awal yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan berupa sosialisasi kepada kepala sekolah. di SMP N 1 Prambanan Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender adanya pemahaman kesetaraan gender yang dijunjung tinggi. Adapun faktor penghambat lebih pada segi kegiatan fisik, yang mana masih mengedepankan keikutsertaan laki-laki daripada perempuan.

Pada tingkat sekolah menengah atas yakni SMA N 1 Prambanan pelaksanaan PUG di sekolah juga belum ada program khusus yang dilakukan, karena memang masih sebatas sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan

Kabupaten Klaten. Di SMA N 1 Prambanan dalam pelaksanaan PUG faktor yang menjadi pendukung dalam kegiatan ini adalah dari sumber daya sekolah itu sendiri yakni para guru-guru. Kesiapan guru-guru di SMAN 1 Prambanan untuk menerima kebijakan yang ada menjadi mudahnya suatu kebijakan itu dapat dilaksanakan. Adapun faktor penghambat dalam implementasi kebijakan di SMA N 1 Prambanan lebih pada naluri kewanitaan, seperti ada kegiatan-kegiatan yang mana ketika waktunya pulang ibu-ibu masih terpancang waktu, namun bagi bapak-bapak waktu tidak menjadi suatu yang menjadi permasalahan.

### **Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan pada Pendidikan Non Formal**

Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender oleh Dinas Pendidikan pada pendidikan non formal dilakukan pada PKBM Cipta Karya. Sama halnya dengan jenjang pendidikan formal yang lainnya, sosialisasi pengarusutamaan gender dalam pendidikan diberikan kepada koordinator PKBM Cipta Karya bersama dengan kepala sekolah pendidikan formal yang telah ditunjuk.

Dari kegiatan sosialisasi tersebut, dampak yang dirasakan oleh PKBM serta masyarakat sekitar sangat positif. Karena masyarakat kini telah memahami seperti apa itu gender. Terbukti dari berbagai kegiatan yang ada di masyarakat

sekitar PKBM Cipta Karya tersebut adanya sanggar kesenian yang diperuntukkan bagi warga disana yakni ibu-ibu dan bapak-bapak. Masyarakat yang dulunya masih mengesampingkan peranan perempuan dimana perempuan pantas untuk berada dirumah dan membatasi aktivitas diluar rumah, dengan pengahaman tentang peranan laki-laki dan perempuan kini keduanya bisa beriringan. Seperti halnya seni kerajinan yang dikembangkan oleh PKBM Cipta Karya yang mana para pengrajin tidak hanya laki-laki namun perempuan juga turut bekerja sebagai pengrajin kayu.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dalam pelaksanaannya dilakukan pada pendidikan formal dan non formal. Pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender oleh Dinas Pendidikan didukung dengan komunikasi yang jelas, sumberdaya staf yang masih memiliki tanggung jawab ganda, fasilitas yang memadai, anggaran yang bersumber dari APBD serta kewenangan pelaksanaan. Implementasi pengarusutamaan gender dilaksanakan dengan diadakannya kegiatan sosialisasi

gender pada sekolah-sekolah dan lembaga yang berjumlah 13 sekolah dan lembaga dari berbagai jenjang pendidikan di wilayah kecamatan Prambanan Klaten. Kegiatan sosialisasi memberikan pemahaman tentang gender serta pengarusutamaannya di sekolah-sekolah kepada kepala sekolah dan koordinator yang kemudian disampaikan kepada para guru. Implementasi PUG oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah baru sebatas sosialisasi, dan belum ada tindak lanjut kembali dari kegiatan sosialisasi tersebut.

2. Pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten pada sekolah formal maupun non formal terdapat berbagai hambatan dalam pengimplementasiannya. Pada Dinas Pendidikan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan PUG adalah dana guna melaksanakan program-program kegiatan untuk menunjang pelaksanaan PUG. Selain itu, faktor sumber daya yang kurang juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan PUG, karena Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sendiri belum memiliki tim khusus yang fokus dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender sesuai yang dicanangkan oleh pemerintah dalam Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang pendidikan. Pada lingkup

sekolah, yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan PUG itu sendiri terkendala oleh waktu khusus untuk melakukan program kegiatan PUG sehingga gender hanya diintegrasikan ke dalam pembelajaran yang disampaikan oleh guru, serta melalui tindakan atau perlakuan terhadap siswa dan guru dengan tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin, semua memiliki kapasitas yang sama dalam hal apapun.

### **Saran**

Berdasarkan atas penelitian serta informasi yang telah diperoleh, maka dari hasil kajian penelitian mengenai implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Agar pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan terlaksana secara efisien, sebaiknya Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten menunjuk koordinator khusus yang fokus pada bidang gender, tindak dengan mengembangkan tanggung jawab kepada staf yang telah memiliki tanggung jawab dibidang lain. Sehingga dapat lebih terfokus pada ranah atau bidang yang dijalannya.
2. Agar pengarusutamaan gender dapat terlaksana dengan baik, Dinas Pendidikan perlu membentuk tim khusus sesuai dengan pedoman dalam Permendiknas Nomor 84

Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang pendidikan dengan membentuk tim POKJA PUG bidang pendidikan. Sehingga kegiatan PUG tidak hanya sebatas sosialisasi namun ada tindak lanjut seperti perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Selain itu perlu adanya alokasi waktu dan dana khusus untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pendidikan.

3. Rekomendasi kebijakan yang dapat dibuat yakni: a) melakukan studi banding atau *sharing* dengan dinas pendidikan yang telah maju dalam melaksanakan pengarusutamaan gender bidang pendidikan, sehingga dapat menambah wawasan dan memahami strategi dalam mengimplementasikan kebijakan PUG, serta mengadopsi berbagai program yang ada untuk dapat diterapkan dalam rencana program kegiatan PUG di dinas dan sekolah b) Dinas Pendidikan membuat program pelatihan atau *workshop* bagi guru untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di sekolah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abid Rosadi. (2012). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Bidang Pendidikan (Study tentang Kebijakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kabupaten Sleman, Yogyakarta terhadap Kesetaraan Gender. *Skripsi*. FIS UNY.

- Arif Rohman. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Cholid Narbuo dan Abu Achmadi. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Elvi Muawanah. (2009). *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Farida Hanum dan Lutfi Wibawa. (2010). Kesetaraan Gender pada Struktur Aparat Pemd dan Kabupaten Sleman. *Laporan Penelitian Pengembangan Keilmuan Guru Besar*. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- H.A.R Tilaar & Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) NOMOR 9 TAHUN 2000 (9/2000) Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
- Joko Widodo. (2008). *Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Mansour Fakih. (1999). *Analisis Gender Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muh. Roqib. (2003). *Pendidikan Perempuan*. Yogyakarta: Gama Media.
- Paulus Mujiran. (2002). *Pernik-pernik Pendidikan Manifestasi dalam Keluarga, Sekolah dan Penyadaran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia. (2004). *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Riant Nugroho. (2008). *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono. (2008). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudiyono. (2007). *Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Pendidikan. Buku Ajar Jurusan Administrasi Pendidikan*. Yogyakarta: FIP UNY.
- Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Suharsimi Arikunto. (2012). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subari. (1994). *Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin. (2008). *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Yoyon Bahtiar Irianto. (2012). *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wahyu Nurharjadm. 2008. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda Di Sekolah Kejuruan*. Spirit Publik Volume 4 Nomor 3 Hal: 215 – 228